BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Van Horme dan Machowicz (1997) dalam Windri (2008). Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba, nilai pasar perusahaan adalah nilai jual perusahaan atau nilai tambah bagi pemegang saham yaitu bagaimana perusahaan mampu mendapatkan respon pasar sehingga pasar memberikan feedback penilaian terhadap perusahaan, nilai perusahaan akan tercermin dari harga pasar sahamnya, selain itu kesejahteraan pemegang saham ditunjukan melalui harga pasar saham perusahaanya, yang juga merfleksikan dari keputusan investasi,

Laba adalah bagian dari laporan keuangan, jika laporan laba rugi perusahaan tidak menyajikan fakta sebenarnya tentang kondisi ekonomis perusahaan, maka laba tersebut dapat diragukan kualitasnya. Laba yang tidak menujukan informasi yang sebenarnya tentang kinerja menajemen dapat menyesatkan pihak pengguna laporan keuangan. Jika seperti ini digunakan oleh investor untuk membentuk nilai pasar perusahaan maka laba tersebut tidak dapat menjelaskan nilai pasar perusahaan sebenarnya, Gideon (2005) dalam Windri (2008).

Masalah corporate governance menjadi menarik dalam 12 tahun terakhir

Indonesia pada tahun 1997 dan dampaknya terhadap perekonomian belum pulih sampai sekarang terutama di Negara Indonesia. Kesulitan itu tidak hanya dirasakan oleh rakyat miskin yang jumlahnya semakin bertambah dengan krisis tersebut, kalangan pelaku usaha pun juga tidak terkecuali ikut merasakannya. Bagi negara kita krisis ini kemudian diperburuk lagi dengan krisis politik dengan puncaknya berupa jatuhnya pemerintahan Soeharto di tahun 1998 sehingga pada akhirnya merusak perekonomian Indonesia. Pada saat itu negara kita bukan lagi hanya sekedar mengalami krisis keuangan melainkan telah meluas menjadi krisis ekonomi. Hal ini ditandai dengan Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga mengalami penurunan menjadi sekitar Rp15.000 (Zhuang dkk. 2001). dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang mencapai titik paling rendah sejak masa pemerintahan Soeharto, yakni sebesar minus 13 persen (Kompas 2002). Ungkapan Dorojatun Kuntjoro Djakti yang berbunyi: "Tidak ada Negara yang kuat tanpa dunia usaha yang kuat" kiranya terbukti dengan adanya krisis ekonomi yang telah disinggung di atas. Berbagai pihak menuding penyebab terjadinya krisis finansial tersebut adalah pengelolaan perusahaan yang tidak baik (bad corporate governance), Maksum Azhar (2005).

Menurut Crosby, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Negaranegara asia telah menjalar secara sistemik dan menjadi semacam budaya. Konglomerasi yang dijalankan oleh kelompok-kelompok kepentingan yang memiliki link dengan institusi-institusi keuangan yang besar bahkan dengan Negara, menutup kemungkinan bagi pengawasan pihak luar. Para konglomerat dangan memanfastkan kongksi tingkat tinggi mereka dan jaminan pemerintah

dapat mengakses utang dari luar tanpa melalui proses kontrol yang memadai. Sementara para investor, kreditur, para pemegang saham minoritas baik dari dalam maupun luar negeri tidak diberi wewenang untuk memonitor perusahaan. hal ini akan menghasilkan *over investment* yang menjerat korporasi-korporasi tersebut dan menghancurkan kepercayaan pasar, (Swa sembada, 2005).

Buruknya pelaksanaan corporate governace dapat meningkatkan resiko berinvestasi yang berimplikasi pada rendahnya minat investor atau kreditur untuk menyalurkan investasi atau kreditnya.

Menurut Menteri koordinator perekonomian Indonesia, DR Budiono, good corporate governance (GCG) adalah suatu pilar sistem ekonomi pasar. Ia berikatan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakan maupun terhadap iklim usaha disuatu Negara. Penerapan good corporate governance mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkanya good corporate governance perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan (Pedoman GCG 2006).

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mendorong penerapan good corporate governance, antara lain pada tahun 1999 membentuk Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) telah mengeluarkan pedoman good corporate governance. Pada tahun 2004 KNKCG diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Pada tahun KNKG menyusun pedoman umum Good Corporate Governance Indonesia, yang merupakan paduan

praktik GCG kepada pemangku kepentingan. Bahkan sejak tahun 2000 Bapepam bersamaan dengan pihak terkait, juga terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bertujuan mendorong penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance kepada semua pelaku pasar di pasar modal Indonesia (Swa sembada 2004).

Sejak tahun 2001, The Indonesia Institut Corporate Governance (IICG) sebuah lembaga swasta bahkan telah melakukan penelitian tentang proses penerapan Good Corporate Governance di perusahaan publik. Dan hasil risetnya berupa pemeringkatan 10 besar perusahaan yang telah menerapkan Good Corporate Governance. Tahun 2002, pemerintah Indonesia dalam hal ini kantor kementrian BUMN telah membuat keputusan Menteri BUMN No Kep-17/M-MBU/2002 tentang penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, yang didalamnya menjabarkan tentang prinsip- prinsip Good Corporate Governance yang sejalan dengan Prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh OECD (Organization for Economoc Corporation and Development) yaitu Transparancy, Accountability, Responbility, Independence, Fairness. Transparancy berarti perusahaan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah di akses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Jadi harus ada pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparan sehubungan dengan struktur dan operasi perusahaan. Accountability, artinya perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Maka perusahaan yang dikelola dengan benar dan terukur sesuai lainya, diharapkan akan mencapai kinerja yang berkesinambungan (Swa sembada 2004).

Corporate governance diperlukan untuk mengendalikan prilaku pengelolaan perusahaan agar tidak hanya bertindak untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan pemilik. Pengelola dikatakan memperhatikan kepentingan pemilik apabila aktivitas yang dilakukan dan keputusan yang diambil ditujukan untuk meningkatkan nilai perusahaan (Indri, 2005).

Perusahaan publik memerlukan dana dalam jumlah yang besar dari pihak investor untuk membiayai kegiatan usahanya dan untuk dapat memperoleh dana investasi tersebut, maka perusahaan publik harus melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) investor juga lebih menyukai menanamkan investasinya pada pasar yang transparan dan dapat dipercaya. Banyak yang percaya bahwa menginvestasikan dananya pada perusahaan yang transparan akan menjamin kepastian pengembalian dananya. Oleh karena itu dunia Internasional mulai terbuka perhatiannya dengan mensyaratkan Good Corporate Governance kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana investasi (Wuryan Andayani, 2001).

Investor lebih senang menanamkan investasinya kepada perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), karena Corporate Governance yang kuat akan memberikan perlindungan yang efektif kepada para pemegang saham, karyawan dan para pihak kreditur. Dengan demikian Good Corporate Governance merupakan sebuah sistem yang berguna

untuk mengarahkan dan mengontrol perusahaan agar dapat menjalankan usahanya dengan memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Tujuan *Good Corporate Governance* adalah menciptakan hubungan yang baik antara pemegang saham dan *stakeholder* lainnya, sehingga perusahaan dapat dikelola dengan baik dan tercipta akuntabilitas publik (Wuryan Andriyani, 2001).

Penerapan Good Corporate Governance dapat ditelusuri pengembangan agency theory yang menjeleskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan berprilaku. Menurut agency theory adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan konflik. Terjadinya konflik yang disebut agency conflict disebabkan pihak-pihak yang terkait yaitu prinsipal (yang memberi kontrak atau pemegang saham) dan agen (yang menerima kontrak dan mengelola dana prinsipal) mempunyai kepentingan yang saling bertentangan. Jika agen dan prinsipal berupaya memaksimalkan kesejahteraanya masing-masing, serta memiliki keinginan dan motivasi yang berbeda, maka ada alasan untuk percaya bahwa agen (manajemen) tidak selalu bertindak sesuai keinginan prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Pemikiran bahwa pihak manajemen dapat melakukan tindakan yang hanya memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri didasarkan pada suatu asumsi yang menyatakan setiap orang mempunyai perilaku yang mementingkan diri sendiri. Keinginan dan motivasi yang tidak sama antara manajemen dan pemegang saham menimbulkan kemungkinan manajemen bertindak merugikan pemegang saham, antara lain

.. at distributed and another marketing the proposes delege selescens

Beberapa institusi seperti kementrian BUMN, Dirjen pajak, Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) telah mendorong penerapan Good Corporate Governance dan meningkatkan kualitas pengungkapan dalam informasi keuangan. Salah satunya adalah memberikan penghargaan kepada perusahaan yang go public yang dinilai telah memberikan informasi yang paling terbuka dalam laporan keuangan tahunanya (Annual report Award), (Warta Ekonomi, 2002). Annual report Award ini diberikan kepada perusahaan yang memenuhi kretiria kelengkapan dalam penyajian laporan keuangan tahunan, khususnya untuk informasi mengenai profil perusahaan, pengungkapan visi dan misi perusahaan berkaitan dengan pelaksanaan Corporate Governance, analisis dan pembahasan manajemen atas kinerja perusahaan, laporan keuangan yang tidak direkayasa, serta informasi lain yang relevan dangan kebutuhan *stakeholder* (Zulfikar, 2006).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analsis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Pasar Perusahaan pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia".

B. Batasan masalah penelitian.

1. Objek penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di bursa Efek Indonesia

(RED yang masuk kedalam pemeringkatan penerapan cornorate governance

yang dilakukan oleh *Indonesian Institute for corporate governance* (IICG) bekerjasama dengan majalah SWA Sembada.

 Periode penelitian yang digunakan adalah periode 2003, 2004, 2005, 2006 dan 2007.

C. Rumusan Masalah Penelitian.

Dengan melihat latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara good corporate governance dengan nilai pasar perusahaan?
- 2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara profitabilitas dengan nilai pasar perusahaan?
- 3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran perusahaan (Size) dengan nilai pasar perusahaan?
- Apakah antara good corporate governance, profitabilitas, ukuran perusahaan
 (Size) secara bersama-sama berpengaruh signifikan dengan nilai pasar perusahaan.

D. Tujuan Penelitian.

- 1) Untuk menguji apakah terdapat pengaruh signifikan penerapan good corporate governance dengan nilai pasar perusahaan.
- y 2) Untuk menguji apakah terdapat pengaruh signifikan profitabilitas dengan nilai pasar perusahaan.
 - 2) Until manmii anakah tardanat nangamh signifikan ukuman namsahaan (Siza)

4) Untuk menguji apakah good corporate governance, profitabilitas, ukuran perusahaan (Size) secara bersama-sama berpengaruh signifikan dengan nilai pasar perusahaan.

E. Manfaat penelitian.

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi penulis, bagi akademisi, bagi perusahaan dan investor. Adapun manfaat yang bisa diperoleh antara lain:

1. Manfaat bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat menerapkan ilmu keuangan yang telah diperoleh selama di bangku kuliah. Selain itu lewat penelitian ini berharap mendapatkan referensi tambahan tentang keanekaragaman ilmu ekonomi.

2. Manfaat bagi akademis.

Penelitian ini bisa digunakan bagi kalangan akademisi sebagai sarana untuk menambah wawasan dan mendorong penelitian lebih lanjut mengenai corporate governance, profitabilitas, size dan nilai pasar perusahaan.

3. Manfaat bagi investor.

alah nara manajar namusahaan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan memberi masukan kepada para investor, dan dijadikan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan berinvestasi yang mungkin akan terjadi di pasar sehingga dapat menentukan keputusan investasi yang tepat apakah perusahaan tersebut benar-benar baik atau hanya terlihat baik karena adanya rekayasa keuangan yang dilakukan

4. Manfaat bagi perusahaan.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan, khususnya mengenai pengaruh penerapan good corporate governance, return on asset, size terhadap nilai pasar perusahaan (Tobin's Q). Dengan adanya berbagai pemeringkatan perusahaan berdasarkan corporate governance perception indek yang diterapkan, penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan keyakinan akan kegunaan hasil pemeringkatan tersebut untuk dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan.